



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém

Conceição Savio, E. da

Citation

Conceição Savio, E. da. (2016, January 28). *Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/37552>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/37552>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/37552> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Conceição Savio, Edegar da

Title: Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém

Issue Date: 2016-01-28

BAB 1

Pendahuluan dan latar belakang studi

1.1 Pendahuluan

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang sejarah pulau Timor dan proses politik di Timor-Leste dilihat dari berbagai sudut. Bab ini juga menguraikan geografi, topografi dan demografi Timor-Leste dan Lautém.

Timor-Leste beraneka bahasa (multibahasa). Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa di Timor-Leste terdapat enam belas bahasa yang diakui dalam Konstitusi. Sebenarnya Konstitusi tidak menyebutkan berapa bahasa yang diakui. Hal ini bisa menimbulkan pelbagai interpretasi banyaknya bahasa yang ada di Timor-Leste.

Bab ini adalah sebuah pengantar sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém dan membicarakan literatur tentang bahasa Fataluku. Data-data survei terdapat di Bab 4. Bagian (1.2) memperbincangkan sejarah pulau Timor, letak geografisnya dan besarnya wilayah Timor-Leste dan Lautém, bagian (1.3) membicarakan bahasa dan keberaksaraan di Timor-Leste dan Lautém, bagian (1.4) membahas pertanyaan penelitian dan metodologi, bagian (1.5) menerangkan struktur buku dan bagian terakhir (1.6) adalah abstrak.

1.2 Sejarah dan geografi pulau Timor

Sejarah Pulau Timor

Mengikuti pandangan Huber (2011:2), pulau Timor sering disebut sebagai kemungkinan rute migrasi manusia yang membentuk masyarakat di Australia dan Melanesia (Glover, 1986:4). Penemuan awal pemukiman memperlihatkan bahwa umurnya mungkin 40.000 tahun. Pulau Timor ini dihuni oleh penutur yang baik berbahasa Austronesia maupun berbahasa Papua. Hal ini menunjukkan banyaknya migrasi manusia.

Mengikuti pandangan Hudijono et al. (2012:9), pulau Timor pertama kali disebutkan secara resmi dalam tulisan Chau-yu-kua pada tahun 1225 dengan istilah *Kih-ri Tinwu*, sedangkan musafir Cina yang lain, Dao Yi Zhi Lue pada tahun 1350 menyebutkan Timor dengan istilah *Guli Dimen*.

1.2.1 Kolonialisme Portugis 1514-1975

Menurut Hägerdal (2012:4), pada tahun 1522 pedagang Portugis datang ke pulau Timor untuk pertama kali dengan Ekspedisi Magelhaes. Menurut Hudijono et al. (2012:9-10), orang Portugis sudah tiba di pulau Timor pada 6 Januari 1514, dan pemukiman Portugis pertama ada di Lifau pada tahun 1520.

Pada tahun 1613 orang Belanda tiba di Solor dan merebut benteng Portugis di sana. Peperangan antara Portugal dan negeri Belanda untuk memperebutkan Timor berlanjut setelah VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yaitu sebuah persekutuan dagang Hindia-Belanda, menaklukkan sebuah benteng kecil di Kupang. VOC dan Portugal menandatangani perjanjian Den Haag pada 12 Juni 1642 untuk menghindari persaingan. Salah satu isinya adalah bahwa pulau Timor dan pulau Sulawesi terbuka bagi orang Belanda dan orang Portugis dan Belanda diperbolehkan mengawini putra Solor. Pada tahun 1661 perjanjian baru diadakan di Den Haag antara negeri Belanda dan Portugal setelah 50 tahun konflik kekuasaan.

Menurut Hadiwinata (2007:45), konflik Belanda-Portugis atas perdagangan kayu cendana Timor, secara sporadis berlangsung hingga tahun 1755, ketika keduanya membagi pulau Timor menjadi dua bagian: bagian barat menjadi milik Belanda dan bagian timur menjadi milik Portugis dengan pusatnya di Dili. Perundingan lanjutan pada tahun 1846, menghasilkan kesepakatan baru di mana Portugal mempertukarkan wilayah Flores dengan sebuah daerah *eksklave* Oecusse di Timor. Sejak zaman itu, negeri Belanda menguasai pulau Flores dan Portugal menguasai wilayah Oecusse di Timor Barat. Dalam perjanjian antara Portugal dan negeri Belanda pada tahun 1904-1914, Portugal menguasai pulau Timor bagian timur, yang dinamakan Timor Portugis (yang sekarang adalah Timor-Leste) dan negeri Belanda menguasai bagian barat, yang dinamakan Timor Belanda (yang sekarang adalah bagian propinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Indonesia). Dan perjanjian itu masih dipakai sampai sekarang ini, sebagaimana diungkapkan Conceição Savio (2002:255).

Menurut Hudijono et al. (2012:11) pusat kedudukan Portugis tergusur dari Lifau pada tahun 1769 karena pemberontakan Francisco da Hornay II, sehingga Gubernur Portugis mengungsi ke Dili yang setelahnya menjadi pusat kedudukan Portugis di Timor.

Dari tahun 1514 sampai tahun 1975 Timor Portugis pertamalah merupakan bagian koloni Macão dan akhirnya menjadi salah satu propinsi Portugis tersendiri (Ramos-Horta, 1998:35).

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, Timor dipersatukan oleh tentara penduduk dengan pusatnya di Kupang dan di Dili. Pada waktu itu perbatasan tidak diberlakukan lagi. Namun setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tahun 1945, Timor dikembalikan dan perbatasan antara Timor Portugis Timor Belanda kembali berlaku. Gubernur Ferreira de Carvalho kembali memimpin propinsi Timor Portugis.

1.2.2 Penjajahan Indonesia 1975-1999

Partai FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente* atau Front Revolusi Kemerdekaan Timor-Leste) memproklamkan kemerdekaan dari Portugal pada tanggal 28 November 1975. Xavier do Amaral menjadi presiden pertama, dan Nicolão dos Reis Lobato menjadi presiden kedua. Di pihak lain, sesudah dua hari, pada 30 November 1975, empat partai lainnya, yaitu partai *União Democrática Timorese* (UDT, Uni Demokratis Timor), *Associação Popular Democrática Timorese* (APODETI, Asosiasi Demokratis Rakyat Timor), *Klibur Oan Timor Asuwain* (KOTA, Asosiasi Perwira Orang Timor), dan *Trabalhista* (Partai Buruh) dengan perjanjian Balibo atas nama rakyat Timor menyatakan bahwa Timor Portugis merdeka dan ingin bergabung dengan bangsa dan Negara Republik

Indonesia. Tujuh hari kemudian, pada tanggal 7 Desember 1975 pulau Timor diinvasi Republik Indonesia dan nama Timor Portugis diganti menjadi Timor Timur, sebagai propinsi termuda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan ketetapan No. 7/MPR/1976.

Pada bulan Mei 1998, wajah politik Indonesia berubah karena krisis ekonomi, gerakan reformasi, demokratisasi, dan merosotnya peranan Tentara Nasional Indonesia yang melemahkan posisi tawarnya (*bargaining position*) di arena politik Indonesia. Menurut Conceição Savio (2002:2-7), pada tanggal 27 Januari 1999 Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan politik untuk menyelesaikan masalah Timor Timur untuk selama-lamanya, dengan menawarkan opsi bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum dengan dua opsi, yaitu: tetap bergabung dengan Indonesia atau kemerdekaan. Pada tanggal 5 Mei 1999 Pemerintah Indonesia, Pemerintah Portugal dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat untuk membentuk suatu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya masalah Timor Timur diselesaikan. Pada tanggal 22 Mei tahun 1999, Dewan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET, Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur) untuk menjalankan referendurnya yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Pada tanggal 4 September UNAMET mengumumkan hasil referendum, yaitu kemerdekaan dari Republik Indonesia.

1.2.3 Kemerdekaan Timor-Leste 1999

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan, berdasarkan bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membentuk satu badan yang mengambil alih pemerintahan transisi yang dinamakan *United Nations Transition Administration for East Timor* (UNTAET, Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa) di bawah pimpinan Sérgio Vieira de Melo (Conceição Savio, 2002:9). Kemudian pada tanggal 20 Mei 2002 Timor-Timur menjadi Negara secara resmi dengan nama Timor-Leste. Timor-Leste menjadi negara termuda di Asia Tenggara dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa yang ke-191. Nama resmi dalam bahasa Portugis ialah Timor-Leste, dalam bahasa Tetun ialah Timor-Lorosa'e. Istilah *Leste* dalam bahasa Portugis dan *Lorosa'e* dalam bahasa Tetun berarti 'Timur'.

Mari bini Amude Alkathiri adalah seorang muslim yang menjadi Perdana Menteri pertama di Timor-Leste yang mayoritasnya beragama Katolik. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan kekuasaan pada 2002, presiden pertama adalah Kay Rala Xanana Gusmão yang sebenarnya nama samarannya waktu masih gerilyawan di hutan; nama aslinya adalah José Alexandre Gusmão. Presiden kedua adalah José Ramos-Horta dan Presiden ketiga adalah Taur Matan Ruak (nama aslinya José Maria de Vasconcelos). Pada masa Presiden Jose Ramos-Horta dan Presiden Taur Matan Ruak, Kay Rala Xanana Gusmão menjadi Perdana Menteri.

Timor-Leste lepas dari Indonesia, tetapi masih sangat bergantung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya berhubungan dengan keamanan, dan pada sejumlah negara donor internasional berhubungan dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, penataan sistem administrasi pemerintahan, sistem hukum dan pendidikan.

Suku Bangsa Timor-Leste

Penduduk Timor-Leste terdiri dari beberapa suku bangsa yang berbeda bahasa dan unsur adat istiadat serta kemasyarakatannya (Neonbasu, 1994:29).

Penduduk Timor-Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Melanesia. dan sebagian kecil penduduk ada keturunan Portugis. Penduduk Timor-Leste memperlihatkan ciri fisik Negrito dan Melanesia (Barros, 1993:25). Penduduk di daerah pegunungan mempunyai ciri fisik seperti kulit kehitam-hitaman, sedang penduduk daerah yang berdekatan dengan pantai memperlihatkan ciri fisik Melayu dengan kulit coklat, rambut lurus dan tubuh tinggi. Conceição Savio (2002:61) berkata bahwa Timor-Leste ada 12 kelompok etnis yang masing-masing mempunyai bahasa tersendiri. Ketika Portugal meninggalkan Timor Portugis, penduduk wilayah ini berjumlah 680.000 orang: 97% orang Timor (termasuk orang Mestizo), 2% orang Tionghoa dan kurang dari 1% orang Portugis.

Mayoritas penduduk beragama Katolik (94,05%), juga ada yang beragama Kristen Protestan (3%), beragama Islam (1%), dan sisanya (1,95%) menganut agama Budha, Hindu dan lain-lainnya (Maulana, 2011:33).

Sejarah, geografi dan topografi di Lautém

Distrik Lautém adalah salah satu distrik yang terletak di ujung paling timur pulau Timor. Distrik Lautém dibatasi oleh selat Wetar di sebelah utara, Laut Banda di sebelah timur Kabupaten Indonesia Maluku Barat Daya, Laut Timor di sebelah selatan dan berbatasan dengan Baucau dan Viqueque di bagian barat (Latuconsina, 1997:61).

Menurut Berlie (2008:360), 'Distrik Lauteinu' identik dengan nama salah satu dewan kotapraja zaman Timor Portugis. Pada saat itu, banyak daerah memiliki nama Portugis, seperti Vila Nova de Malaca (sekarang: Lautém), Nova Nazaré (sekarang: Com), Nova Sagres (sekarang: Tutuala) dan Nova Ancora (sekarang: Laivai).

Distrik Lautém terdiri dari sebuah dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan. Dataran tinggi ini adalah padang rumput yang cukup subur. Distrik ini merupakan daerah yang hujannya paling banyak di seluruh wilayah Timor-Leste.

Jumlah Penduduk Timor-Leste dan Lautém

Latuconsina (1997:3-5) berkata bahwa persentase penduduk perempuan melebihi penduduk laki-laki. Ini bisa dilihat dari rasio penduduk Lautém pada zaman Indonesia (berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1990). Pada saat itu laki-laki berjumlah 1.732 jiwa dan perempuan berjumlah 23.658 jiwa. Republik Demokratik Timor-Leste beribukota Dili dan terdiri dari 13 distrik. Pada tahun 2010, penduduk Timor-Leste berjumlah 1.154.625 jiwa dan ibukota Dili berpenduduk 166.903 jiwa (Molnar, 2010:5).

Tabel berikut menunjukkan jumlah total penduduk yang didaftarkan sesuai dengan Sensus Penduduk tahun 2011 di distrik Lautém, terdiri dari: kepala keluarga, perempuan dan laki-laki, menurut desa (*suco*) dan kampung (*Aldeia*) di subdistrik masing-masing di wilayah Lautém.

Tabel 1.1: Penduduk tiga subdistrik di Lautém

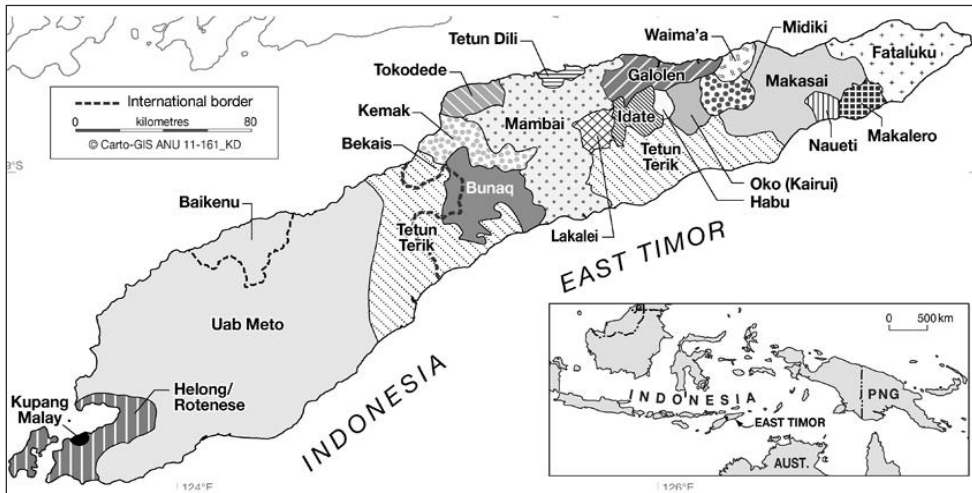
No	Desa	Kepala keluarga	Subtotal Perempuan	Subtotal Laki-laki	Total
Subdistrik Lospalos					
1	Bauro	687	1.397	1.397	2.770
2	Cacavem	361	756	760	1.516
3	Fuilorro	2.349	5.834	5.508	11.342
4	Home	470	1.061	1.090	2.151
5	Lore I	610	1.425	1.400	2.825
6	Lore II	298	708	613	1.321
7	Leuro	237	487	480	967
8	Muapitine	408	1.045	1.028	2.073
9	Raça	333	726	772	1.498
10	Souro	634	1.471	1.507	2.978
Total		6.387	14.910	14.555	29.441
Subdistrik Tutuala					
11	Mehara	389	921	799	1.720
12	Tutuala	466	1.375	1.235	2.610
Total		855	2.296	2.034	4.330
Subdistrik Lautém ¹					
13	Parlamento	566	1.362	1.207	2.569
14	Com	645	1.539	1.624	3.163
15	Pairara	392	978	956	1.934
16	Maina I	378	811	722	1.533
17	Badura	280	642	639	1.281
18	Maina II	445	986	961	1.947
19	Serelau	276	614	615	1.229
20	Daudere	456	974	1.064	2.038
21	Euquisi	283	567	588	1.155
22	Ililai	208	426	454	880
Total		3.929	8.899	8.830	17.729

Sumber: Data riset lapangan (tanggal 29 Agustus 2011)

¹ Juga dikenal dengan nama Moro

1.3 Bahasa dan Keberaksaraan di Timor-Leste dan Lautém

Timor-Leste ada enambelas bahasa daerah dan juga bahasa asing. Komunitas bahasa terbesar, yaitu: komunitas bahasa Mambai, Tetun, Makasae dan bahasa Fataluku (Engelenhoven, 2006:4-6), seperti dapat dilihat di Gambar 1.2.



Gambar 1.2: Peta etno-linguistik Timor (Sumber: McWilliam & Traube, 2011)

Menurut Engelenhoven (2006:5-6), secara umum dapat dikatakan bahwa orang Timor-Leste sekurangnya menguasai tiga bahasa: bahasa ibu mereka, bahasa Tetun sebagai *lingua franca* dan bahasa Indonesia. Dibandingkan dengan Singapura dan negara India Tamilnadu, bilingualisme, atau multilingualisme dalam hal ini, di Timor-Leste berhubungan dengan latar belakang individu penutur. Di kota seperti Dili, misalnya, seseorang mungkin fasih dalam bahasa Tukodede – bahasa ayahnya, bahasa Makasai – bahasa ibunya, dan tentu saja dalam bahasa Tetun-Prasa, bahasa daerah Dili. Juga mungkin bahwa orang ini menguasai suatu bahasa keempat yang dituturkan oleh kakek-neneknya, misalnya bahasa Mambae. Multilingualisme individu lebih logis kalau menyangkut bahasa yang lebih kecil, khususnya rantai dialek Karui-Waimaha-Midiki-Naueti dan Idatê-Isní-Lolein-Lakalei, rantai dialek Atauro dan bahasa kecil Makuva, Lolein dan Bekais yang memerlukan kontak bahasa eksternal dan perkawinan campuran untuk melangsungkan masyarakatnya. Berbeda dengan kasus Tamilnadu dan Singapura, tidak ada ‘bahasa pokok’ tetap di Timor-Leste, kecuali kalau melihat jumlah penutur yang pasti.

1.3.1 Bahasa Fataluku

Menurut Engelenhoven (2006), bahasa Fataluku adalah bahasa nonAustronesia atau bahasa Papua. Penutur bahasa Fataluku berdiam di tiga subdistrik dan 22 desa dan berjumlah 51.502 jiwa menurut data distrik Lautém (Administração do Distrito de Lautém, 2011). Penutur Fataluku, baik urban maupun rural, mengalami pergeseran penggunaan berbagai bahasa, sejak zaman Portugis sampai kemerdekaan pada tahun 2002. Bahasa Fataluku di Lautém sebenarnya sudah diteliti oleh pastor Náchter pada tahun 1960 yang kemudian dihadiahkan kamus Fataluku oleh muridnya. Pembuatan kamus Fataluku-Portugis bermaksud mempermudah hubungan antara paroki dan gereja yang dipersulit oleh penggunaan bahasa Portugis.

Menurut Fitzpatrick et al. (2012), ada tiga subdistrik dengan tujuh dialek Fataluku yang dapat dimengerti oleh semua penutur. Kutipan data di atas kurang menjelaskan alasan penetapan dialek Fataluku dan metode apa yang digunakan untuk menentukannya.

Sedangkan Hull (2005) berkata: ‘terdapat lima dialek: dialek Barat Laut (Serelau, Mahina II, Baduro, Daudere), dialek Utara (Mahina I, Pairara, Parlamento dan Kom), dialek Sentral (Leuro, Souro, Home, Raça, Fuiloro, Bauro, Muapitine), dialek Selatan (Lore I, dan Lore II) dan dialek Timur (Mehera dan Tutuala) ...’

Walaupun Fitzpatrick et al. (2012) kurang menjelaskan pengelompokan dialek, penulis sependapat bahwa di Lautém terdapat tujuh dialek. Penulis kurang setuju dengan pandangan Hull atas penentuan dialek sentral Lospalos. Menurut penulis, dialek sentral Lospalos hanya meliputi isolek Fuiloro, Raça, Bauro dan Muapitine, sedangkan isolek Home, Souro dan Leuro merupakan dialek lain. Pertamanya, logat dan bunyinya berbeda sehingga tidak bisa dianggap sebagai satu dialek. Keduanya, Hull lupa untuk memasukkan dialek Cacavem sebagai dialek tengah tersendiri.

Menurut Valentim (2002), terdapat lima dialek, yaitu dialek barat laut (Serelau, Mahina II, Baduro, Daudere, Mahina I, Pairara, Parlamento dan Kom), dialek sentral (Fuiloro, Home, Raça, Bauro, Muapitine, Leuro dan Souro), dialek tengah (Cacavem), dialek Selatan (Lore I dan Lore II), dan dialek timur (Mehara dan Tutuala). Penulis kurang setuju dengan Valentim bahwa dialek barat lautnya dianggap satu dialek. Argumentasinya adalah bahwa isolek Baduro, Daudere dan Mahina I merupakan dialek tersendiri. Sedangkan isolek Pairara, Parlamento dan Kom merupakan dialek utara tersendiri. Alasan utamanya adalah bahwa logat dan bunyinya berbeda sehingga tidak bisa dianggap sebagai satu dialek.

Untuk itu, penulis mengelompokan tujuh dialek Fataluku di Lautém, yaitu: dialek Barat Laut (Serelau, Mahina II, Baduro, Daudere, Euquisi dan Ililai), dialek Utara (Mahina I, Parlamento, Pairara, Com), dialek Sentral (Fuiloro, Raça, Bauro dan Muapitine), dialek Barat (Home, Souro, Leuro), dialek Tengah (Cacavem), dialek Selatan (Lore I dan Lore I), dan dialek Timur (Mehara dan Tutuala). Perbedaan antara tujuh dialek Fataluku bisa dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2: Tujuh dialek Fataluku di Lautém

Terjemahan	Barat Laut	Utara	Sentral	Barat	Tengah	Selatan	Timur
kuda	<i>kuḏa</i>	<i>kuḏa</i>	<i>kuca</i>	<i>kuca</i>	<i>kuca</i>	<i>kuca</i>	<i>kuca</i>
babi	<i>pai</i>	<i>bai</i>	<i>pai</i>	<i>pai</i>	<i>pai</i>	<i>pai</i>	<i>pai</i>
tidur	<i>taza</i>	<i>taza</i>	<i>taya</i>	<i>taza</i>	<i>taya</i>	<i>taya</i>	<i>taya</i>
istri	<i>zeu</i>	<i>zeu</i>	<i>zeu</i>	<i>zeu</i>	<i>zeu</i>	<i>zeu</i>	<i>jeu</i>
orang	<i>ma 'ar</i>	<i>ma 'ar</i>	<i>mar</i>	<i>ma 'ar</i>	<i>ma 'ar</i>	<i>ma 'ar</i>	<i>mar</i>
kebun	<i>pala</i>	<i>pala</i>	<i>pala</i>	<i>leku</i>	<i>pala</i>	<i>pala</i>	<i>pala</i>
itu	<i>fon</i>	<i>fon</i>	<i>fan</i>	<i>fon</i>	<i>fon</i>	<i>fon</i>	<i>fan</i>
akan	<i>ma 'u</i>	<i>ma 'u</i>	<i>mau</i>	<i>ma 'u</i>	<i>ma 'u</i>	<i>kar</i>	<i>mau</i>
lihat	<i>aḏi</i>	<i>aḏi</i>	<i>aci</i>	<i>aci</i>	<i>aci</i>	<i>aci</i>	<i>aci</i>

Tabel di atas menjelaskan perbedaan antara tujuh dialek Fataluku di tiga subdistrik Lautém. Penutur dialek Fataluku langsung saling mengerti. Logat dan kosakata merupakan perbedaan utama antara ketujuh dialek. Dialek Barat Laut, Utara, Barat dan Selatan berkecenderungan memperpanjang vokal yang bertekanan. Dialek Timur berkecenderungan menekan suku kata akhir. Dialek Sentral tidak berciri tekanan khusus atau pemanjangan vokal. Dialek Utara cuma berbeda intonasi dengan dialek Barat Laut. Kedua dialek Barat Laut dan Utara ada oklusif apiko-alveolarnya (d) yang bersuara yang diganti dengan oklusif palatal (c) yang tak bersuara dalam semua dialek lainnya. Dialek Timur dan Sentral berkecenderungan menghilangkan hamzah (') yang tetap muncul dalam dialek lainnya. Oklusif palatal yang bersuara (j) dalam dialek Timur menjadi frikatif alveolar bersuara (z) dalam semua dialek lainnya, sambil luncuran palatal (y) dialek Timur dan dialek Sentral juga menjadi frikatif alveolar bersuara (z) dalam semua dialek lainnya. Dialek Barat kadang-kadang berbeda istilah dengan dialek lainnya, seperti *leku* 'kebun', yang berbunyi *pala* dalam semua dialek lainnya. Seperti dapat dilihat dalam tabel di atas, demonstrativa *fan* dialek Sentral dan dialek Timur menjadi *fon* di semua dialek lainnya.

1.3.2 Keberaksaraan di Timor-Leste

Pada zaman pemerintahan Portugis hampir tidak ada perkembangan keberaksaraan, Cuma gereja yang meneliti bahasa lokal. Menurut Gusmão (Juli 2013), sejak tahun 1856, Gereja Katolik pertama kali menggunakan bahasa Tetun sebagai bahasa komunikasi antarparoki di pulau Timor. Pada tahun 1974 FRETILIN menegaskan konsep keberaksaraan dalam program pemberantasan buta huruf (Cabral & Martin-Jones, 2008). Aktivitas politik FRETILIN dalam edukasi dimulai pada tahun 1974 dalam kampanye mereka tentang program pemberantasan buta aksara, diprakarsai oleh António Carvarinho sebagai salah satu anggota Komite Sentral FRETILIN. Kampanye difokuskan pada pengajaran keberaksaraan melalui media Tetun dan didasarkan pada buku panduan berjudul *Rai Timor, Rai ita nian* (Tanah Timor, Tanah kita) dan berisikan beberapa ide tentang keberaksaraan dan beberapa pengajaran berdasarkan pendekatan Paul Freire di Brasilia pada 1960-an (Taylor, 1991). Pada tahun 1983, Uskup Carlos Belo yang memimpin gereja Katolik di Timor Timur pada waktu itu, menetapkan bahasa Tetun sebagai bahasa liturgi di seluruh Timor Timur.

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (2002) mengatakan bahwa bahasa Tetun dan bahasa Portugis adalah bahasa resmi (pasal 13 ayat 1). Pasal 13 ayat 2 menegaskan bahwa bahasa Tetun dan bahasa nasional lainnya dihargai dan dikembangkan oleh Negara. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diakui sebagai bahasa kerja selama perlu (pasal 159).

Ortografi bahasa Fataluku diusulkan Engelenhoven dalam *Endangered Languages Program* (Program Bahasa-bahasa Terancam) dari NWO (proyek no. 256-70-560). Ortografi ini berdasarkan standar ortografi nasional Timor-Leste yang dilakukan oleh Institut Nasional Linguistik (Engelenhoven, 2006) dan sedang diadaptasikan Dewan bahasa Fataluku di Lospalos.

1.4 Pertanyaan penelitian dan metodologi

Pertanyaan riset

Berdasarkan latar belakang disebut di atas, tujuan riset utama pada umum adalah melihat ke politik bahasa dalam sosiolinguistik Fataluku di Lautém. Pertanyaan riset dan metodologi khususnya menyoroti politik bahasa di Timor-Leste, lanskap linguistik, survei sosiolinguistik dan observasi-observasi kelas. Studi ini menyoroti komunitas grassroots di daerah-daerah urban subdistrik Lospalos dan daerah rural Tutuala di Lautém. Pertanyaan riset adalah:

- 1 Bagaimana bahasa Fataluku berkembang dari bahasa lisan yang terancam ke bahasa tertulis yang terlindung? Masalah apa muncul dalam proses ini?
- 2 Apa perubahan yang terjadi di lanskap linguistik dan apa nilai-nilai bahasa di wilayah yang berbahasa Fataluku di daerah rural Tutuala dan daerah urban Lospalos?
- 3 Apa posisi dan penggunaan bahasa Fataluku dalam program-program keberaksaraan dewasa sekarang?

Metode-metode

Riset ini menggunakan kombinasi survey yang berskala besar dan studi etnografi dalam seperti diusulkan Blommaert & Dong (2010). Menurut Garna (2009:41) etnografi adalah deskripsi rinci kebudayaan, seperti dalam ungkapan ‘tujuan utama etnografi adalah mengerti cara hidup yang berbeda dari sudut pandangan pribumi’. Riset ini diadakan berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan komunitas heterogen di Distrik Lautém. Opini-opini komunitas Fataluku berisikan kesadaran dan penghargaan tradisi tertentu. Aspek tradisi ini yang sangat penting adalah struktur klan di distrik Lautém District (McWilliam & Traube, 2011; Cardoso, 2000). Kini globalisasi mempengaruhi tiap aspek ketertiban kehidupan sosial-budaya, termasuk bahasa. Ini harus diperhitungkan kalau meneliti sosiolinguistik Fataluku di Lautém.

Untuk pertanyaan riset yang pertama (mengenai perkembangan bahasa Fataluku dari bahasa lisan ke bahasa tertulis) data terkumpul melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer ada data yang terkumpul melalui wawancara-wawancara dengan pemain kunci, pengguna bahasa tertulis, pengajar dan pelajar. Ahli bahasa Fataluku yang diwawancarai di Indonesia dan Lautém juga termasuk.

Sumber-sumber sekunder adalah data yang terkumpul melalui riset arsip (khususnya berkaitan dengan politik bahasa nasional), buku-buku, media sosial dan sumber lain (seperti website Fataluku.com dan Fataluku.org). Analisanya meliputi diskusi-diskusi tentang politik bahasa dan dokumen-dokumen.

Untuk pertanyaan riset kedua dan ketiga (mengenai sikap tentang bahasa Fataluku di lanskap linguistik dan penggunaan bahasa Fataluku di edukasi keberaksaraan dewasa), sebuah survey dan beberapa studi kasus diadakan di daerah rural Tutuala dan daerah urban Lospalos. Studi kasus diadakan dengan pendekatan etnografis, termasuk observasi-observasi, wawancara yang berisi pertanyaan terbuka dan teknik-teknik penelitian informal (Wuryandari et al., 2007:25) yang memungkinkan responden-responden bercakap secara bebas, pemotretan peristiwa-peristiwa keberaksaraan, catatan lapangan, rekaman-rekaman audio di kelas keberaksaraan dewasa. Di kedua daerah Tutuala dan Lospalos penggunaan bahasa Fataluku sebagai bahasa pengajaran dalam kelas-kelas dewasa keberaksaraan Tetun

diteliti secara dalam. Begitu fokus diarahkan ke peristiwa-peristiwa khusus di kelas yang memperlihatkan penggunaan lebih daripada satu bahasa oleh pengajara dan pelajar. Peristiwa ini, yaitu kejadian kunci (Kroon & Sturm, 2007), merupakan permulaan analise data kelas. Perincian yang lebih spesifik tentang metodologi studi linguistik kelas akan diberikan di Bab 5. Di kedua daerah juga sebuah studi lanskap linguistik diadakan yang menyoroti bahasa-bahasa terlihat atau tercetak di ruang umum. Pengumpulan data terjadi dengan memotret sebanyak mungkin contoh-contoh bahasa terlihat. Perincian tentang metodologi lanskap linguistik yang lebih lanjut akan diberikan di Bab 3.

Sebuah kuesioner survey dikembangkan yang berdasarkan upama-upama riset Eritrea oleh Asfaha (2009) dengan maksud mengumpulkan data penggunaan dan nilai bahasa. Surveinya terdiri dari pertanyaan mengenai bahasa yang dapat dimengerti, dibaca dan ditulis dan yang lebih disukai untuk membaca dan menulis serta paling sering digunakan dalam domain yang berbeda oleh responden di Distrik Lautém. Termasuk juga pertanyaan mengenai posisi spesifik bahasa Fataluku dan masa depannya. Pengumpulan data memerlukan kurang lebih delapan bulan dan dibagi dalam tiga tahap: pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012.

Tahap pertama berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2010. Kerja lapangan dimulai pada pemerintah lokal tingkat distrik, subdistrik, suco dan aldeia di subdistrik Lospalos dan Tutuala. Sepuluh suco daerah urban diobservasi serta dua suco subdistrik Tutuala. Wawancara diadakan dengan semua ahli bahasa Fataluku di Indonesia dan di Lospalos, dan dengan coordinator, pengajar, pelajar dan pemimpin komunitas lokal. Selama tahap pertama kuesioner dibagi antara 212 orang.

Tahap kedua berlangsung dari bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2011 waktu pengajar diwawancarai dan kuesioner dibagi antara 51 orang di daerah rural subdistrik Tutuala. Selama tahap kedua ini 263 orang ikut serta dalam kedua subdistrik. Selama tahap kedua juga diadakan observasi-observasi kelas keberaksaraan dewasa melalui rekaman audio dan video, catatan di lapangan dan foto-foto. Observasi kelas meliputi 14 kelas dan empat pengajar (satu perempuan dan tiga laki-laki), tetapi menyoroti dua kelas di daerah urban, satu kelas di daerah semi-urban dan satu kelas di daerah rural.

Fokusnya diarahkan pada lanskap linguistik Lautém dengan memotret sebanyak mungkin bahasa tertulis yang terlihat di lingkungan umum di wilayah urban, semi-urban dan rural. Selama tahap ketiga juga diadakan sebuah loka karya di Lautém yang membahas hasil pertama riset dan melibatkan pemerintah lokal, direktorat jurusan pendidikan, koordinator keberaksaraan, pengajar, beberapa pemimpin suco dan kepala aldeia.

1.5 Struktur Buku

Untuk mencapai sasaran penelitian seperti disampaikan di atas, maka struktur disertasi ini dibagi dalam enam bab pokok bahasan. Pada tiap bab terdapat kesimpulan dan abstrak berbahasa Inggris.

Bab satu adalah pendahuluan dan memberikan informasi umum kepada pembaca mengenai latar belakang dan konteks yang diperlukan untuk memahami penelitian yang telah dilakukan. Ini termasuk informasi sejarah, demografi dan geografi Timor-Leste. Juga diberikan informasi mengenai budaya dan tradisi umum di Lautém. Dalam paragraf berikutnya terdapat informasi mengenai bahasa ko-ofisial dan

nasional serta kondisi keberaksaraan di Timor-Leste. Lalu pertanyaan reset dan metodologi yang digunakan dibahas.

Bab kedua membahas politik bahasa di Timor-Leste dan Lautém dan mendeskripsikan kebijakan prosesnya. Bab ini memberikan informasi tentang bahasa di Lautém dan komunitas berbahasa Fataluku. Bab ketiga menjelaskan lanskap linguistik di Lautém berdasarkan foto tanda linguistik di beberapa daerah. Survei kuesioner dilaksanakan di subdistrik Lospalos, Tutuala dan subdistrik Lautém (juga disebut Moro). Ini memperlihatkan hirarki bahasa dalam lanskap linguistik di distrik Lautém.

Bab keempat adalah survey mengenai kemahiran, penggunaan dan sikap berbahasa di Lautém. Bab ini menjelaskan hasil survei kuesioner yang mengandung penjelasan yang lebih detil daripada bab sebelumnya berdasarkan analisis data penelitian lapangan. Di dalamnya terdapat teori, pertanyaan kuesioner dan metodologi. Kemudian dibahas bahasa dan keberaksaraan, kemahiran berbahasa dan sikap masyarakat terhadap bahasa Fataluku di Lautém.

Bab kelima mengenai interaksi kelas keberaksaraan multilingual di Lautém. Bab ini menjelaskan bahasa yang digunakan oleh guru dan pelajar. Oleh karena pengajaran dalam bahasa Fataluku belum ada, diputuskan untuk meneliti pengajaran dalam bahasa Tetun. Kemudian bab ini berfokus pada penggunaan bahasa Fataluku dan bahasa lainnya sebagai bahasa komunikasi guru dan pelajar atau sebagai bahasa instruksi keberaksaraan. Dalam bab ini juga digunakan data yang dikumpulkan dalam studi kasus yang telah dilakukan di subdistrik Lospalos dan Tutuala.

Bab keenam adalah penutup. Pada bab terakhir ini disampaikan ikhtisar semua bab dan menempatkannya ke dalam perspektif teoretis serta praktis yang lebih luas. Kemudian bab ini memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak yang berkompeten dalam membentuk kebijakan politik bahasa di Timor-Leste.

1.6 English abstract

Chapter 1 introduces the research topic of this thesis and provides some background information.

Section 1.1 contains an introduction and presents the structure of this chapter.

Section 1.2 provides a historical and geographical overview of Timor Island and the Lautém District. Archaeological research states that Timor Island has been inhabited for at least 40.000 years. The first Chinese records date from the 13th and 14th centuries AD. Throughout the 16th and 17th Century AD the Portuguese and the Dutch fought over the possession of the island. In 1755 the island was divided into a western part under Dutch control and an eastern part under Portuguese control. In 1846 the Dutch bartered Oecusse in western Timor for Flores Island that was controlled by the Portuguese. In 1769 the administrative center moved from here to Dili in Portuguese Timor. Portuguese Timor gained independence on November 28th, 1975, but was already occupied by the military forces of the Republic of Indonesia on December 7th, 1975, after which it became an Indonesian province under the name *Timor Timur*. In 1999 president B.J. Habibie agreed in a referendum for East Timor in which the population could opt either for independence from Indonesia or for continuation as a province within the republic. On August 30th, 1999, a referendum was held under the auspices of the United Nations in which a majority voted for independence. On October 25th, 1999, the United Nations installed an administration

that governed East Timor during its transition towards independence. East Timor became officially independent on May 20th, 2002 under the Portuguese and Tetum names of *Timor-Leste* and *Timor-Lorosa'e*, respectively, which both mean 'East Timor'.

East Timor's geography features two plateaus, one in Maliana in the West and one in Baucau in the East, that are separated by small lowlands. Its population descends both from Proto Malays and Papuans with only a small segment having Portuguese ancestry. There are 12 ethnic groups that according to the literature each have their own language. The majority adheres to the Roman-Catholic faith.

Lautém is the easternmost district of the country and borders in the East on the Indonesian regency of Southwest Maluku and in the West on the districts of Baucau and Viqueque. Lautém itself is a plateau surrounded by mountain ridges.

Section 1.3 introduces the languages in Timor-Leste and Lautém District. Timor-Leste displays multilingualism in which many individuals master three or more languages: their mother tongue, Tetum and Indonesian or Portuguese. The language under investigation in this thesis is Fataluku, one of the four largest languages of the country with about 70.000 speakers. It has seven mutually intelligible dialects that are generally distinguished by their prosodies. Tetum has been a general contact language since 1856 and became the language of literacy in the 1974 literacy program of FRETILIN. A Fataluku orthography is being worked on by the Fataluku Language Council.

Section 1.4 elaborates on the research questions and the methodology. There are three research questions the thesis intends to answer:

- 1 How does Fataluku develop from an endangered oral language into a protected written language? What kind of problems arise in this process?
- 2 What are the changes in the linguistic landscape and the language attitudes in the Fataluku speaking regions?
- 3 What is the position of Fataluku in present adult literacy programs and how is it used in there?

This research used a combination of a survey and an ethnographic study as proposed by Blommaert (2013), using interviews, questionnaires, photographs, classroom observations and audiorecordings. It was conducted in three periods in 2010, 2011 and 2012.

Section 1.5 provides the overall structure of the book: Chapter 1 is an introduction. Chapter 2 discusses the language policy of Timor-Leste and provides information about the languages in Lautém and the Fataluku speech community. Chapter 3 discusses the linguistic landscape of Lautém District and shows the language hierarchy in there. Chapter 4 is a study on proficiency in and use of languages and language attitudes in Lautém District. Chapter 5 investigates multilingual interactions in literacy classes in Lautém District and specifically focuses on Fataluku as a language of instruction and communication in teacher-learner interactions. Chapter 6 contains the conclusions of all previous chapters and proposes some recommendations.

